

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum KPP Pratama Kab. Kudus

#### 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus

Sebagaimana umumnya instansi pemerintah lainnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kab. Kudus dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan mengikuti dinamika dan perubahan lingkungan. KPP Pratama Kab. Kudus terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan penggabungan tiga kantor yang berlokasi di kabupaten Kudus yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak KPP Kudus
- b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KPPBB Kudus
- c. Kantor Pemeriksaan Pajak Karikpa Kudus

Pada tahun 2008 KPP Pratama Kudus resmi *launching* berdasarkan KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007, dengan tempat kedudukan di Jalan Niti Semito Kudus.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus wilayah Kabupaten Kudus yang terdiri dari 9 Kecamatan, berdasarkan keadaan per Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terdiri dari Kepala Kantor, Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Dan Penilai PBB.

Sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Kudus per 01 Januari 2015 s.d. Desember 2015 berjumlah 86 orang yang terdiri dari

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

Eselon III, Eselon IV, Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai PBB, Account Representative, Pelaksana dengan golongan II, III, IV dan pendidikannya meliputi lulusan SD, SLTA, Program D1, D3, D4, S1 dan S2.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus adalah gedung kantor (terdiri dari 1 gedung kantor, gedung TPT, gedung eks. KP PBB Kudus, gedung eks. KP4 Mejobo), kendaraan dinas, jaringan sistem informasi data, sarana peribadatan dan sarana olah raga. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus mencakup Kabupaten Kudus yang terbagi 9 Kecamatan.

## **2. Visi KPP Pratama Kudus**

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Indonesia.

## **3. Misi KPP Pratama Kudus**

Menghimpun penerimaan pajak dengan menyelenggarakan pelayanan dan edukasi perpajakan demi mewujudkan masyarakat Kudus yang sadar dan tertib pajak.

## **4. Tujuan**

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki, maka KPP Pratama Kudus telah menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Merealisasikan rencana penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Kudus.
- b. Peningkatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak
- c. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.
- d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.
- e. Peningkatan profesionalisme dan integritas SDM

## 5. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus terbagi dalam 9 Kecamatan yaitu : Kecamatan Kota, Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jati, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo.

## 6. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

### a. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 mempunyai tugas : Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi dan pemeriksaan pajak;
- 7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 8) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 10) Pelaksanaan intensifikasi;
- 11) Pembetulan ketetapan pajak;
- 12) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
- 13) Pelaksanaan administrasi kantor.

#### **b. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada pasal 60, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor  
Kepala Kantor mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di KPP Pratama Kudus.
- 2) Sub bagian Umum  
Mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di KPP Pratama Kudus.
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi  
Mempunyai tugas pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer serta penyiapan laporan kinerja
- 4) Seksi Pelayanan  
Mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yaitu penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, administrasi dokumen perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan, dan registrasi Wajib Pajak.

5) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan serta penyimpanan dokumen penagihan

6) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pengawasan pelaksanaan, dan administrasi pemeriksaan perpajakan, melakukan pemantauan manajemen resiko dan pengendalian internal, pengawasan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta tindak lanjutnya.

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas melakukan penggalian potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi pajak.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

## 7. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus keadaan per 31 Desember 2015 secara keseluruhan mencapai 83 orang yang ada pada masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

Kepala Kantor	=	1 orang
Subbagian Umum	=	7 orang
Seksi Pengolahan Data dan Informasi	=	6 orang

Seksi Pelayanan	=	12 orang
Seksi Penagihan	=	5 orang
Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	=	3 orang
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	=	4 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	=	12 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	=	11 orang
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	=	11 orang
Fungsional Pemeriksa Pajak	=	12 orang
Fungsional Penilai PBB	=	2 orang
		=====
Jumlah	=	86 orang

#### **8. Rencana Strategik dan Penetapan Kinerja**

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih professional dan mampu mencapai tingkat kesempurnaan yang dicita-citakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara professional dan efisien untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan Negara.

#### **9. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi**

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

#### **10. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pajak**

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama berusaha untuk menjadi aparat yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Sesuai peran strategis pajak adalah sebagai salah satu penggerak proses pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengumpul/pemungut dan pengadministrasian pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena tingkat keberhasilan pemenuhan target penerimaan Pajak akan sangat berpengaruh bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Apalagi dimasa sekarang ini bahwa Pajak merupakan pilar ekonomi dan pembangunan negara.

#### **11. Sumber Penerimaan Pajak**

Beberapa sumber daya yang menunjang penerimaan pajak antara lain potensi penerimaan pajak hasil tembakau (perusahaan rokok), percetakan, perdagangan, dan jasa yang mendominasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Prata Kudus. Selain itu juga ditunjang Sumber Daya

Manusia dalam pelaksanaan tugas-tugas KPP Pratama Kudus dengan berbagai macam latar belakang pendidikan.

## B. Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Kudus. Sampel yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Kudus sebagai pengguna *e-filing* dengan jumlah 99.

### 1. Jenis Kelamin Responden

Adapun data dan prosentase mengenai perbandingan jenis kelamin responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Pria	58	58.6 %
2.	Wanita	41	41.4 %
	Total	99	100 %

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden sebagian besar berjenis kelamin pria sebesar 59.6 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden di Kabupaten Kudus adalah berjenis kelamin laki-laki

### 2. Umur Responden

Adapun data mengenai umur responden yang diambil adalah:

**Tabel 4.2**

#### Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Prosentase
1.	< 30 tahun	32	32.3 %
2.	31 – 40 tahun	38	38.4 %
3.	41 – 50 tahun	29	29.3 %
4.	51 > tahun	-	-
	Total	99	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar berusia 31-40 tahun. Hal ini dapat diketahui dari prosentasenya sebesar 38.4%.

### 3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

#### **Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	SLTA	10	10.1 %
2.	Diploma	5	5.1 %
3.	S1	79	79.7%
4.	S2	5	5.1 %
5.	S3	-	-
	Jumlah	99	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini dapat diketahui dari prosentasenya sebesar 79.7%.

### 4. Jenis Pekerjaan/ Profesi

Adapun jenis pekerjaan responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

#### **Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	PNS	48	48.5 %
2.	Swasta	41	41.4 %
3.	Lain-lain	10	10.1%
	Jumlah	99	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah PNS. Hal ini dapat diketahui dari prosentasenya sebesar 48.5%.

## 5. Bidang Pekerjaan

Adapun tingkat bidang pekerjaan responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

### **Demografi Responden Berdasarkan Bidang Pekerjaan**

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Keuangan	13	13.1 %
2.	Pajak	16	16.2 %
3.	Lainya	70	70.7 %
	Jumlah	99	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2016*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar bidang pekerjaan responden adalah selain Keuangan dan Pajak. Hal ini dapat diketahui dari prosentasenya sebesar 70.7%.

## C. Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor atau butir pertanyaan dengan skor konstruk atau variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan cara uji signifikansi yang membangun  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = n-k. dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah konstruk. Apabila  $r_{hitung}$  untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation* lebih, maka dapat dikatakan valid.

Untuk tingkat validitas, dilakukan tingkat uji signifikansi dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* (df) = n-k dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstuk. Pada kasus ini, besarnya df dapat dihitung dengan 99 - 3 atau df = 96 dengan *alpha* 0,05 didapat  $r_{table}$  0,1966 jika  $r_{hitung}$  (untuk tiap butir dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Corelation*) lebih besar dari  $r_{table}$  dan nilai r positif maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Instrumen**

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	Keterangan
Minat Penggunaan E-Filing (Y)	P1	0.590	<i>Valid</i>
	P2	0.590	<i>Valid</i>
Persepsi Kegunaan (X1)	P1	0.499	<i>Valid</i>
	P2	0.367	<i>Valid</i>
	P3	0.527	<i>Valid</i>
	P4	0.454	<i>Valid</i>
Persepsi Kemudahan (X2)	P1	0.594	<i>Valid</i>
	P2	0.494	<i>Valid</i>
	P3	0.383	<i>Valid</i>
	P4	0.441	<i>Valid</i>
	P5	0.544	<i>Valid</i>
	P6	0.516	<i>Valid</i>
Keamanan dan Kerahasiaan (X3)	P1	0.475	<i>Valid</i>
	P2	0.629	<i>Valid</i>
	P3	0.508	<i>Valid</i>
	P4	0.584	<i>Valid</i>
	P5	0.615	<i>Valid</i>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu koesioner dikatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau hasil stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji *reabilitas instrument*, penulis menggunakan analisis SPSS. Berikut ini hasil pengujian reliabilitas berdasarkan *pilot test* (responden) sebesar 99 orang.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrumen**

Variabel	Reliability Coefitiens	Alpha	Keterangan
Persepsi Kegunaan ( $X_1$ )	4 item	0.677	<i>Reliabel</i>
Persepsi Kemudahan ( $X_2$ )	6 item	0.756	<i>Reliabel</i>
Keamanan dan Kerahasiaan ( $X_3$ )	5 item	0.786	<i>Reliabel</i>
Minat Penggunaan <i>E-Filing</i> (Y)	2 item	0.741	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian, semua variabel ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan Y) dapat dikatakan reliabel.

#### D. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah suatu data dianalisa lebih lanjut diperlukan suatu uji asumsi klasik agar hasil dan analisa nantinya efisien dan tidak biasa.

##### 1. Uji Autokorelasi

Uji autokolerasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier dan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) jika terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi, untuk mengetahui apakah model regresi mengandung autokolerasi dapat digunakan pendekatan Durbin Watson.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Koefisien	Nilai
Durbin-Watson	2.368
dL	1.610
dU	1.735

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Dari hasil pada tabel diatas menunjukkan pengujian autokolerasi dengan menggabungkan uji Durbin-Watson atau residual persamaan regresi diperoleh angka d-hitung DW sebesar 2.368. Untuk menguji

gejala autokolerasi, maka angka d-hitung DW sebesar 2.368 tersebut dibandingkan dengan nilai d-teoritis dalam t tabel d-statistik. Durbin-Watson dengan titik signifikansi  $\alpha = 5\%$  dari tabel d-statistik Durbin-Watson diperoleh nilai dl sebesar 1.610 dan du 1.735 karena hasil pengujiannya adalah  $4-dU \leq d \leq 4-dL$  ( $4-1.735 \leq 2.432 \leq 4-1.610$ ) atau ( $2.264 \leq 2.368 \leq 2.390$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (berada didaerah keragu-raguan).

## 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terdapat hubungan atau saling berkolerasi. Cara yang dipakai untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*variance inflation factor*), jika nilai VIF kurang dari angka 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil perhitungannya dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Persepsi Kegunaan ( $X_1$ )	0.825	1.213
Persepsi Kemudahan ( $X_2$ )	0.830	1.205
Keamanan dan Kerahasiaan ( $X_3$ )	0.887	1.128

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

Dari hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan diketahui bahwa nilai tolerance variabel  $X_1$  sebesar 0.825,  $X_2$  sebesar 0.830, dan  $X_3$  sebesar 0.887 dan VIF masing-masing sebesar 1.213, 1.205 dan 1.128. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki *tolerance* lebih kecil dari 10 persen dan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Berdasarkan grafik *Scatterplot* yang diolah menggunakan SPSS

16 menunjukkan bahwa ada pola yang tidak jelas, serta ada titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Berdasarkan Normal *Probability Plot* yang diolah menggunakan SPSS 16 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresinya memenuhi asumsi normalitas.

### E. Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Dalam menjelaskan data dan variabel dalam penelitian supaya mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka akan dideskripsikan baik berupa tabel maupun diagram.

Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Minat Penggunaan Efiling (Y)	99	6	10	8.62	0.877
Persepsi Kegunaan (X1)	99	13	20	16.65	1.710
Persepsi Kemudahan (X2)	99	19	30	24.59	2.803
Keamanan dan Kerahasiaan (X3)	99	15	25	20.19	2.324

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa jumlah data penelitian (N) adalah sebesar 99. Variabel Minat Penggunaan *E-Filing* mempunyai nilai minimum 6 dan nilai maksimum sebesar 10. Nilai rata-rata Minat Penggunaan *E-Filing* adalah sebesar 8.62 dengan nilai standart deviasi sebesar 0.877.

Pada variabel Persepsi Kegunaan dilakukan pengamatan terhadap 99 responden, dimana dari 99 responden mempunyai nilai minimum 13 dan nilai maksimum 20. Nilai Rata-rata Persepsi Kegunaan adalah sebesar 16.65 dengan nilai standart deviasi adalah sebesar 1.710.

Pada Variabel Persepsi Kemudahan dilakukan pengamatan terhadap 99 responden, dimana dari 99 responden mempunyai nilai minimum 19 dan nilai maksimum sebesar 30 dan nilai rata-rata Persepsi Kemudahan adalah sebesar 24.59 dengan nilai standart deviasi sebesar 2.803.

Pada Variabel Keamanan dan Kerahasiaan dilakukan pengamatan terhadap 99 responden, dimana dari 99 responden mempunyai nilai minimum 15 dan nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata – rata Persepsi Kepuasan Pengguna adalah sebesar 20.19 dengan nilai standart deviasi sebesar 2.324.

## 2. Uji Statistik

### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, perepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan terhadap minat penggunaan *e-filing*. Dengan bantuan SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) 16 mendapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**

#### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	Nilai Koefisien
Konstanta	2.798
Pelatihan Manajemen ( $X_1$ )	0.111
Jiwa Kewirausahaan ( $X_2$ )	0.072
Komitmen Organisasional ( $X_3$ )	0.108

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

Pada tabel perhitungan diatas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 2.798 + 0.111X_1 + 0.072X_2 + 0.108X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Minat Penggunaan E-filing

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = koefisien regresi variabel independen

$X_1$  = Persepsi Kegunaan

$X_2$  = Persepsi Kemudahan

$X_3$  = Keamanan dan Kerahasiaan

$\varepsilon$  = standar error

Berdasarkan regresi linier berganda diatas dapat diartikan bahwa :

Konstanta sebesar 2.798 menyatakan bahwa jika variabel independen yaitu persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, persepsi kerumitan, dan persepsi kepuasan pengguna dianggap konstan atau sama dengan (0), maka variabel minat penggunaan *e-filing* sebesar 2.798.

Koefisien regresi Variabel Persepsi Kegunaan sebesar 0.111 berarti bahwa jika variabel persepsi kegunaan mengalami kenaikan sebesar 100%, sementara persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan dianggap tetap maka akan meningkatkan minat penggunaan *e-filing* sebesar 11.1 %.

Koefisien regresi Variabel Persepsi Kemudahan sebesar 0.072 berarti bahwa jika variabel persepsi kemudahan mengalami kenaikan sebesar 100%, sementara persepsi kegunaan, serta keamanan dan kerahasiaan dianggap tetap maka akan meningkatkan minat penggunaan *e-filing* sebesar 7.2 %.

Koefisien regresi Variabel Keamanan dan Kerahasiaan sebesar 0.108 berarti bahwa jika variabel keamanan dan kerahasiaan mengalami kenaikan sebesar 100%, sementara persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan dianggap tetap maka akan meningkatkan minat penggunaan *e-filing* sebesar 10.8 %.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk memperkirakan atau meramalkan nilai variabel independen (Y) perlu dilakukan perhitungan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi Y. dengan demikian antara variabel dependen dan independen tentunya mempunyai hubungan atau korelasi. Dalam penelitian ini variabel dependen atau terikat (Y) adalah Minat Wajib Pajak Pribadi untuk Menggunakan *E-Filing*, selanjutnya variabel independen atau bebas adalah Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan (X2), serta Keamanan dan Kerahasiaan (X3). Hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien	Nilai
R	0.540
Adjusted R square	0.270

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

Berdasarkan tabel koefisien determinasi diketahui bahwa nilai koefisien *r Square* sebesar 0,540, yang berarti Nilai *r Square* tersebut menunjukkan bahwa 54,0% variabel minat penggunaan *e-filing* dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel yang digunakan dalam model yaitu persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan, sedangkan 46,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**c. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Pengujian parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji parsial

ini yang terdapat dalam hasil perhitungan. *Ordinary Least Square* (OLS) ditunjukkan dengan t hitung. Secara lebih rinci t hitung dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Koefisien Regresi**

Variabel	T <sub>hitung</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig.	Interprestasi
Faktor Persepsi Kegunaan (X <sub>1</sub> )	2.279	1,660	0.025	Berpengaruh
Faktor Persepsi Kemudahan (X <sub>2</sub> )	2.445	1,660	0.016	Berpengaruh
Faktor Keamanan dan Kerahasiaan (X <sub>3</sub> )	3.129	1,660	0.002	Berpengaruh

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

**d. Uji Koefisien Regresi secara Bersama-sama (Uji f)**

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai f hasil perhitungan dan nilai f menurut tabel, dengan kriteria sebagai berikut:

1. jika  $F_{hitung} > F_{table}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. jika  $F_{hitung} < F_{table}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti masing-masing variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Statistik F dengan menggunakan program SPSS 16 (*Statistic Product and Service Solution*) maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji F**

Model	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Sig.	Interprestasi
Regresi	13.068	2.70	0.000	Berpengaruh

*Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2016*

Pada tabel hasil uji f di atas tampak bahwa nilai  $F = 13.659$  yang lebih besar dari  $F$  tabel 2,70 dengan angka signifikansi  $0,00 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, serta keamanan dan kerahasiaan yang mampu menjelaskan besarnya variabel dependen penggunaan *e-filing*.

## F. Pembahasan

### 1. Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Minat Penggunaan *E-Filing*

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *e-filing*. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variabel persepsi kegunaan yang menunjukkan angka positif sebesar 0.111 dan mempunyai signifikansi 0.025 di bawah 0.05, sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Risal C.Y Laihah, Nurul Citra Noviadini, Agus Andrian, Kertahadi, dan Heru Susilo, Ivana Lie dan Arja Sadjiartoyang menghasilkan bahwa persepsi kegunaan mempengaruhi minat penggunaan *e-filing*.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara persepsi kegunaan dengan minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing* adalah apabila manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem *e-filing*, maka respon wajib pajak akan semakin positif dalam penggunaan *e-filing*, sehingga akan mendorong minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak orang pribadi.

Untuk meningkatkan manfaat dalam menggunakan *e-filing* dibutuhkan kesadaran dari DJP untuk menekankan keuntungan dalam hal manfaat, kenyamanan, dll. Seseorang akan merasa terbiasa terdahulu dan menikmati menggunakan *e-filing* lalu mereka akan dapat merasakan kegunaan dari *e-filing*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kegunaan yang diterima oleh pengguna *e-filing* maka akan

mendorong orang tersebut dalam menggunakan *e-filing*. Begitu juga apabila semakin tidak adanya atau rendah kegunaan yang diterima oleh pengguna *e-filing* maka orang tersebut tidak akan menggunakan *e-filing*. Dengan demikian kegunaan suatu sistem harus terus ditingkatkan oleh DJP karena hal tersebut akan meningkatkan pengguna *e-filing*, serta mengajak Wajib Pajak lain yang belum menggunakan *e-filing* untuk menggunakan *e-filing*.

Persepsi kegunaan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Wajib pajak yang merasakan manfaat dari *e-filing* akan selalu mencoba menggunakan *e-filing* untuk melaporkan pajaknya karena *e-filing* sangat membantu meningkatkan kinerja, menambah tingkat produktifitas, meningkatkan efektifitas kinerja, dan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

## **2. Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan E-Filing**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *e-filing*. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi variabel persepsi kemudahan yang menunjukkan angka positif sebesar 0.072 dan mempunyai signifikansi 0.016 dibawah 0.05, sehingga membuktikan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Risal C.Y Laihad, Nurul Citra Noviandini, Agus Andrian, Kertahadi, dan Heru Susilo, Ivana Lie dan Arja Sadjiarto, yang menghasilkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap tingkat penggunaan *e-filing*.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara persepsi kemudahan dengan minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing* adalah apabila kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan sistem *e-filing* maka respon wajib pajak akan semakin positif dalam penggunaan *e-filing*, sehingga akan mendorong minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing*.

Persepsi kemudahan merupakan tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem informasi yang dapat mengurangi upaya (tenaga dan waktu) individu dalam melakukan pekerjaannya. Dalam kaitannya dengan minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing*, maka kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* itu sangat penting. Dalam prakteknya, sistem *e-filing* ini dapat membantu wajib pajak agar lebih mudah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang merasakan kemudahan ketika menggunakan *e-filing* karena mudah dipelajari, mudah untuk digunakan, mudah memahami saat berinteraksi, mudah beradaptasi, mudah untuk menjadi terampil, dan mudah secara keseluruhan dalam penggunaan *e-filing*. Wajib pajak juga tidak perlu datang langsung ke kantor pajak. Maka wajib pajak tersebut sangat terbantu dengan adanya sistem *e-filing* ini. Kemudahan sistem *e-filing* ini yang menyebabkan minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filing* ini semakin meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan *e-filing* ini berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing*.

### **3. Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Penggunaan E-Filing.**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *e-filing*. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi variabel kemanan dan kerahasiaan yang menunjukkan angka positif sebesar 0.108 dengan signifikansi 0.002 di bawah 0.05, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-filing* diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ricky Alfianto Wowor, Jenny Morasa, dan Inggriani Elim yang menghasilkan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan *e-filing*.

Temuan empiris terkait dengan adanya hubungan antara keamanan dan kerahasiaan terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan *e-filing* adalah bahwa sistem *e-filing* dapat memberikan

keamanan dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak orang pribadi untuk menggunakan *e-filing* dalam pelaporan pajaknya.

Dalam kaitannya dengan intensitas penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak orang pribadi, maka terjaganya keamanan dan kerahasiaan data yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut sangat penting. Dalam prakteknya, kebanyakan wajib pajak masih menggunakan sistem manual dalam pelaporan pajaknya. Padahal sistem manual tersebut tidak menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang mereka laporkan. Hal tersebut yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem *e-filing* ini. Beberapa wajib pajak beranggapan bahwa melaporkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan sistem *e-filing* ini dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut.

Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah. Sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Wajib pajak yang merasakan keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan *e-filing* akan merasakan bahwa pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* aman bagi pengguna, dapat memberikan tingkat jaminan yang tinggi, dapat menjaga kerahasiaan, tidak khawatir dengan masalah keamanan ketika melaporkan pajaknya.